

## **PERJUANGAN POLITIK SECARA KOOPERATIF PADA MASA HINDIA BELANDA**

**Mita Dina Prastiewy Hutauruk<sup>1</sup>, Aminah Safitri<sup>2</sup>, Rosmaida Sinaga<sup>3</sup>**  
[mitadinaprastiewyhutauruk@gmail.com](mailto:mitadinaprastiewyhutauruk@gmail.com)<sup>1</sup>, [aminahsafitri05@gmail.com](mailto:aminahsafitri05@gmail.com)<sup>2</sup>, [rosmaidasinaga@unimed.ac.id](mailto:rosmaidasinaga@unimed.ac.id)<sup>3</sup>  
**Universitas Negeri Medan**

### **Abstrak**

Tulisan ini membahas tentang Masa-masa Perjuangan Politik di Indonesia secara Kooperatif pada masa Kolonial Hindia-Belanda berkuasa. Strategi Pergerakan Nasional secara Kooperatif adalah strategi perang yang sifatnya moderat yang dilakukan para pejuang Indonesia untuk melawan penjajah Belanda. Tujuan penulis dalam penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis sebagian dari masa Pergerakan Nasional Indonesia, mulai dari terbentuknya organisasi Budi Utomo 1908 dan lahirnya golongan elit terpelajar yang menjadikan cikal bakal lahirnya babakan dan semangat baru dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah berdirinya organisasi Budi Utomo banyak organisasi maupun partai politik yang lahir di Indonesia, dimana organisasi-organisasi ini memiliki tujuan yang sama yaitu Indonesia Merdeka. Kemudian salah satu media utama dalam Pergerakan Nasional Indonesia ini adalah Pers, bahkan setiap partai ataupun organisasi pergerakan pada awal ke-20 memiliki surat kabar masing-masing. Sejarah yang panjang mengenai Perjuangan Politik secara Kooperatif dalam Pergerakan Nasional Indonesia pada masa Hindia-Belanda akan dibahas dalam artikel ini, mulai dari tahun 1930-1942. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yaitu: Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi, dan juga Historiografi.

**Kata Kunci:** Perjuangan Politik, Pergerakan Nasional, Indonesia.

### **Abstract**

*This article discusses the Cooperative Period of Political Struggle in Indonesia during the Dutch East Indies colonial era. The Cooperative National Movement Strategy was a moderate war strategy carried out by Indonesian fighters to fight the Dutch colonialists. The author's aim in writing this article is to analyze part of the period of the Indonesian National Movement, starting from the formation of the Budi Utomo organization in 1908 and the birth of the educated elite group which was the forerunner to the birth of a new chapter and spirit in the history of the struggle of the Indonesian people. The results of this research show that after the founding of the Budi Utomo organization, many organizations and political parties were born in Indonesia, where these organizations had the same goal, namely Independent Indonesia. Then one of the main media in the Indonesian National Movement was the press, in fact every party or movement organization in the early 20th had its own newspaper. The long history of Cooperative Political Struggle in the Indonesian National Movement during the Dutch East Indies period will be discussed in this article, starting from 1930-1942. The method used in this research is historical research methods, namely: Heuristics, Source Criticism, Interpretation, and also Historiography.*

**Keywords:** Political Struggle, National Movement, Indonesia.

### **PENDAHULUAN**

Menjelang lahirnya Pergerakan Nasional, di dalam masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang di jajah Bangsa lain, terdapat berbagai keadaan yang serba ditekan. Keadaan ini tidaklah terjadi dalam waktu singkat, akan tetapi berjalan selama puluhan tahun bahkan beberapa ratus tahun. Dalam kondisi semacam itu masyarakat Indonesia berada dalam penguasaan dan penindasan oleh penjajah, yang dalam akalunya adalah melaksanakan dominasi politik, eksploitasi ekonomi dan penetrasi kebudayaan.

Pergerakan Nasional memiliki suatu pengertian yang khas yakni merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh organisasi secara modern kearah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia yang disebabkan rasa ketidakpuasan terhadap keadaan masyarakat yang ada. Dengan demikian istilah ini mengandung arti yang sangat luas, gerakan yang dijalankan memang tidak

hanya terbatas untuk memperbaiki taraf hidup bangsa tetapi juga diliputi berbagai gerakan sektor, seperti: sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, kebudayaan, wanita, pemuda, dan lain-lain.

Istilah Nasional berarti pergerakan-pergerakan yang mempunyai cita-cita Nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsanya yang masih terjajah. Di samping itu, sifat pergerakan pada masa ini lebih bersifat Nasional bila dibanding dengan sifat pergerakan sebelumnya yang bercorak kedaerahan. Masa awal lahirnya Pergerakan Nasional ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan seperti Boedi Oetomo yang didirikan pada tahun 1908, tiga tahun setelah Boedi Oetomo lahir, berdiri organisasi baru bagi orang-orang Islam yaitu Serekat Dagang Islam (SDI) di Solo oleh Haji Samanhudi yang didirikan pada tahun 1911, lalu namanya diubah menjadi Serekat Islam untuk menarik anggota lebih banyak. Selain organisasi yang disebutkan sebelumnya, masih banyak beberapa organisasi-organisasi Pergerakan lainnya yang bersifat Kooperatif maupun Radikal, baik yang dalam negeri maupun luar negeri.

Perjuangan di awal Pergerakan dilaksanakan dengan jalan Kooperatif dan Evolusioner, meskipun unsur Revolusioner sudah mulai mewarnai kegiatannya. Dasar perjuangan belum secara tegas untuk dinyatakan untuk kemerdekaan Indonesia mengingat pada masa itu rakyat Indonesia tidak diperbolehkan berpolitik. Sehingga kegiatannya banyak ditujukan kepada hal-hal yang berkaitan dengan usaha mengatasi penderitaan dan meningkatkan derajat kehidupan rakyat Indonesia. Dengan usaha tersebut, dimaksudkan pula sebagai upaya menanamkan kesadaran Nasional sebagai upaya untuk membangkitkannya agar menjadi semangat Nasional yang melahirkan Perjuangan Pergerakan Nasional.

Organisasi memiliki pandangan bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai kemajuan. Organisasi inilah yang menjadi pelopor terbentuknya organisasi-organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Ada banyak organisasi-organisasi pergerakan di Indonesia, organisasi juga mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup besar pada masanya. Karena kemajuan yang cukup besar tersebut maka organisasi-organisasi pergerakan berkembang pula di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Menurut Robert Bridson Cribb, peranan sejarah lokal dapat membantu mengatasi keseluruhan konteks sejarah revolusi yang lebih luas. Karya Sejarah mengenai revolusi Indonesia cukup banyak difokuskan pada perkembangan beragam peristiwa di tingkat Nasional. Sedangkan gejolak yang terjadi di daerah-daerah hanya melengkapi tema-tema dominan dalam sejarah Nasional. Perspektif kedaerahan dalam penulisannya, sejarah pun relatif diabaikan. Hal tersebut disebabkan dalam menguraikan sejarah Indonesia yang kompleks, para penulis lebih mengutamakan perspektif Nasional. Faktor lain terabaikannya penulisan sejarah lokal adalah kelangkaan berbagai informasi tentang peristiwa di tingkat daerah, sehingga banyak peneliti yang kurang tertarik untuk mengadakan penelitian secara lokal. Hal tersebut disebabkan adanya pemikiran bahwa mengkaji sejarah lokal seolah hanya untuk mengungkapkan peristiwa kedaerahan yang berkejolak di daerah itu, tanpa menyinggung sedikitpun peristiwa yang bersifat Nasional.

Berbicara tentang tokoh Nasional tentu banyak tokoh-tokoh yang muncul dan dijadikan pahlawan Nasional. Di Sukabumi sendiri khususnya, ada banyak tokoh Nasional yang muncul seperti KH. Ahmad Sanusi, KH. Ahmad Halim, KH. Mas Nur, KH. Adnan, Dr. Abdul Karim, H. Yacob dan masih banyak lagi tokoh yang hadir termasuk tokoh cukup berpengaruh dalam revolusi Sukabumi yaitu Mr. R. Sjamsuddin beliau merupakan tokoh yang diangkat oleh Jepang untuk memimpin organisasi Gerakan tiga A yang diprakarsai oleh semboyan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, serta Jepang Pemimpin Asia pada 29 April 1942. Tujuan dari gerakan ini adalah sebagai upaya untuk menanamkan tekad penduduk agar berdiri seutuhnya bersama pemerintah militer Jepang dimana gerakan ini di pimpin oleh Rd. Syamsudin, beliau merupakan ketua dari Partai Indonesia Raya (PARINDRA) yang dahulu pernah memegang jabatan sebagai wakil wali kota Sukabumi dimasa penjajahan Belanda.

Ketika mulai banyak terjadi pergerakan Radikal serta pemberontakan, salah satu jalan yang diambil oleh Pemerintah Kolonial untuk tetap mempertahankan status quo-nya yaitu dengan membentuk sebuah Dinas Intelejen Politik. Pembentukan Dinas Intelejen Politik dikarenakan oleh organisasi yang terus tumbuh dan berkembang serta ada beberapa organisasi yang bersifat Radikal ini sangat mempengaruhi ruang gerak setiap organisasi karena DIP sangat mengawasi segala gerak gerik yang dianggap mencurigakan dan dapat menyebabkan terancamnya status quo pemerintah Kolonial Belanda. Selain dibentuknya DIP tentu saja ada hal lain yang menyebabkan terjadinya krisis pergerakan yaitu pada masa krisis malaise pada tahun 1930 yang terjadi dan juga pemberontakan komunis kepada Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1926/1927. Perjuangan pada babak baru yang terjadi di Indonesia atau yang biasa disebut dengan zaman Pergerakan Nasional sangat berpengaruh pada proses perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Organisasi yang sangat berpengaruh tersebut seperti Boedi Oetomo, PNI, PKI, PARINDRO, GAPI serta organisasi seperti Jamiatul Khair, Al-isyad, Taman Siswa, Serikat Dagang Islam, Serikat Islam, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan lainnya.

Masa pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia pada akhirnya berakhir pada tahun 1942 yaitu pada saat pemerintahan Jepang mengambil alih Indonesia atau Hindia-Belanda ini dari Belanda dengan melakukan ekspansi militer sehingga Kolonial Belanda pun tidak sanggup menghadapinya dan akhirnya menyerah. Maka pada tahun 1942, ini pun berakhir masa pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia dan digantikan oleh masa Pemerintahan Kolonial Jepang. Pada penulisan Artikel ini akan mengkaji tentang Perjuangan Politik Kooperatif Pada Masa Hindia-Belanda.

## **METODOLOGI**

Para peneliti melakukan penelitian sejarah tentu saja bertujuan agar dapat mengetahui kisah dibalik masa lalu, belajar dari masa lalu melalui sebuah pengalaman baik dari kegagalan maupun belajar dari keberhasilan itu sendiri. Selain itu, penelitian sejarah juga sangat bermanfaat bagi manusia dalam mempelajari masa yang sudah berlalu untuk melihat apakah kejadian itu bisa diaplikasikan pada masa sekarang, serta juga membantu memprediksi apa saja yang akan terjadi di masa sekarang dan masa mendatang melalui kajian sejarah yang akan dibahas. Di dalam penulisan ini tentu saja penulis menggunakan empat metode penelitian sejarah yaitu diantaranya adalah Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi, dan juga Historiografi. Di dalam kajian ini sumber yang digunakan penulis yaitu meliputi Buku, Jurnal, Artikel baik dari internet maupun sumber cetak. Sumber-sumber yang digunakan dari peneliti terdahulu menjadi bahan acuan bagi penulis untuk membahas secara detail tentang menganalisis masa Perjuangan Politik Secara Kooperatif Pada Masa Hindia-Belanda di Indonesia pada tahun 1930-1942 (Masa Moderat).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Pergerakan Nasional**

Sartono Kartodirjo mengatakan bahwa dalam mendeskripsikan Pergerakan Nasional menggunakan istilah “Kebangunan Nasional”, Ia mengartikannya pada saat dimulainya fase baru dalam sejarah perjuangan bangsa yakni pada saat berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 di Batavia 10 atau yang sekarang bernama Jakarta. Menurutnya, kelahiran organisasi baru ini didasarkan atas pengalaman-pengalaman bersifat lokal sehingga tidak efektif. Oleh karena itu, dalam fase ini timbullah kesadaran mendalam akan persatuan dan kesatuan dengan menghimpun secara terorganisasi segenap potensi perjuangan yang ada dengan konsep baru. Perubahan pergerakan melawan penjajah dari non-kooperatif menjadi kooperatif merupakan salah satu hasil dari kebijakan pemerintahan kolonial Belanda yaitu Politik Ethis.

Lahirnya kaum-kaum terpelajar diberbagai daerah terutama di Batavia menumbuhkan

kesadaran secara Nasional tentang impian mencapai kemerdekaan. Impian mencapai kemerdekaan seorang bangsa penjajah tentu saja sudah ada sejak awal kedatangan bangsa kolonial ke Nusantara, namun segala upaya yaitu pergerakan melawan penjajah yang dilakukan secara non-kooperatif hanya bersifat kedaerahan saja, tidak membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini tentu saja dalam segi kekuatan, karena jika hanya melakukan perlawanan secara kedaerahan maka hasilnya tetap Kolonial Belanda yang memenangkan karena mereka mempunyai kekuatan militer dan persenjataan yang hebat. Maka pergerakan secara kedaerahan dan memakai senjata ini hanya akan memakan lebih banyak korban jiwa yaitu rakyat yang ikut bertarung.

Moedjanto mencirikan perbedaan perjuangan maupun perlawanan dari rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme yang terjadi di Nusantara sebelum dan setelah 1900, adalah sebagai berikut:

1. Sebelum tahun 1900, perjuangan rakyat berciri perlawanan atau perjuangan bersifat kedaerahan atau lokal, menggantungkan pada tokoh kharismatik, dan belum ada tujuan yang jelas,
2. Setelah tahun 1900, perjuangan rakyat berciri perjuangan yang bersifat Nasional, diplomasi, dan perjuangan dengan organisasi modern.

Alasan mengapa fase baru ini disebut Pergerakan Nasional, yaitu karena orientasi perjuangan yang dilakukan melalui wadah organisasi modern menyangkut arah perbaikan hayat hidup bangsa Indonesia.

### **Masa Krisis Pergerakan Nasional**

Terjadinya masa krisis Pergerakan Nasional dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Krisis Malaise 1929/1930 yang melanda dunia
2. Diterapkannya peraturan pembahasan hak untuk berkumpul dan berserikat (dibentuknya PID)
3. Gubernur Jendral dapat menyatakan organisasi pergerakan atau yang dilakukannya bertentangan dengan law and order termuat dalam (koninklijk besluit 1 September 1919)
4. Banyak tokoh Pergerakan Bangsa Indonesia yang diasingkan.

Krisis Malaise atau sering disebut sebagai "Zaman Meleset" merupakan saat dimana terjadinya malaise atau depresi ekonomi di berbagai dunia, salah satunya adalah Indonesia. Indonesia juga terpengaruh oleh depresi ini baik di kehidupan ekonomi maupun kehidupan politik. Pada saat krisis malaise pihak pemerintah atau perusahaan mengambil keuntungannya sendiri tanpa menghiraukan peranan dan jasa buruh dalam sebuah perusahaan. Akibat malaise, persatuan rakyat terutama kaum buruh semakin kuat, menyebabkan munculnya berbagai pergerakan pemberontakan dan aksi politik lainnya yang dilakukan oleh kaum buruh melalui organisasi pergerakan Nasional yang bersifat Radikal.

Adapun serikat buruh atau organisasi buruh tersebut adalah perserikatan Buruh Kereta Api atau Vereeniging Van Spoor-en Tramwegpersoneel (VSTP), Persatuan Guru Hindia-Belanda (PGHB), Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputra (PPPB), Personeel Fabriek Bond (PFB), Usaha-usaha organisasi buruh tersebut dalam melepaskan diri dari kesengsaraan ekonomi dan politik kolonial Belanda selalu mendapat hambatan-hambatan dari pemerintahan Hindia-Belanda. Hal ini pun menyebabkan pemerintah Hindia-Belanda semakin memperketat pengawasan organisasi pergerakan bahkan menghapuskan organisasi yang bersifat radikal.

Selain krisis Malaise ada faktor luar lainnya yang mempengaruhi krisis pergerakan yaitu berupa sikap keras dari Gubernur Jendral De Jonge. Ia dianggap sangat reaksioner dan kejam karena tidak memberikan kebebasan bagi orang yang mengeluarkan pendapatnya. Salah satu tindakan Gubernur Jendral De Jonge adalah dengan membuat PID (Polietiekr Intelligent Dients) untuk mengawasi dan mengatasi organisasi-organisasi yang sekiranya dapat mengancam status quo pemerintah Hindia-Belanda. Pembentukan PID merupakan salah satu respon dari pemerintah Kolonial Belanda dalam menghadapi pergerakan dari berbagai organisasi yang

terjadi. Adapun strategi PID dalam menghadapi pergerakan dari berbagai organisasi tersebut yaitu:

- 1) Pengawasan terhadap Pergerakan Organisasi dan Tokoh Pergerakannya
- 2) Infiltrasi Agen-Agen Intelijen
- 3) Penangkapan dan pengasingan Tokoh Pergerakan
- 4) Sensor media cetak Pergerakan
- 5) Pengawasan terhadap penduduk asing

Hal ini berarti bahwa tanpa proses pengadilan lebih dahulu ataupun penyelidikan Gubernur Jendral Belanda pada saat itu yaitu De Jonge dapat menyatakan suatu organisasi pergerakan atau kegiatan yang sedang dilakukannya itu bertentangan dengan law and order sesuai dengan Koninklijk Besluit pada 1 September 1919. Peraturan ini merupakan hasil modifikasi dari pasal 111 R.R (Regrering Regiment). Otoritas yang dimiliki Gubernur Jendral De Jonge ini membuat organisasi pergerakan nasional menghadapi hambatan yang besar karena tanpa proses peradilan atau penyelidikan lebih dulu, mereka langsung bisa diadili atau diberi hukuman.

Tan Malaka dalam buku “Dari Penjara ke Penjara” pernah mengatakan bahwa tokoh siapapun yang dianggap mengancam ketentraman imperialisme Belanda boleh ditangkap, dipenjara, sebelum dibuang dan diasingkan. Politik Reaksioner dari Gubernur Jendral De Jonge (1931-1936) telah membuka halaman pergerakan nasional tidak diakui eksistensinya. De Jonge menggunakan hak-hak Exorbitant melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh nasional yang menjadi korban adalah Soekarno. Soekarno ditangkap pada 1 Agustus 1933, dan dibuang ke Flores kemudian Bengkulu.

#### **Pergerakan Nasional Pada Tahun 1940-1942 (Perjuangan Politik Secara Kooperatif)**

Gubernur Jendral Hindia-Belanda De Jonge digantikan oleh Gubernur Jendral baru yaitu Tjarda Van Starckenborgh Stachouwer yang menjabat tahun 1936-1942. Meskipun Gubernur Jendral De Jonge telah tergantikan namun bukan berarti segala aktivitas organisasi pergerakan tidak lagi mendapat pengawasan yang sangat ketat. Hal ini malah terjadi sebaliknya, dimana segala aktivitas organisasi pergerakan nasional pada saat itu diwakili oleh Parindra, Gerindro, dan GAPI tidak bisa berbuat banyak karena pada masa ini segala macam kegiatan sangat diawasi. Aktivitas parlementerlah yang merupakan satu-satunya jalan yang bisa ditempuh demi mendekati pemerintah Hindia-Belanda yang pada saat itu telah mendekati masa kemundurannya.

Dalam posisi Internasional kedudukan Belanda yang semakin sulit membuat pemerintah Kolonial Belanda tidak bisa berbuat banyak ditambah lagi dengan keadaan di Indonesia yang semakin kuat mendesak untuk dilakukannya perbaikan sosial dan politik. Kekuatan politik yang bertahan pada waktu itu adalah Parindra yang terdiri dari kaum golongan menengah, tinggi, dan *cendikiawan*. Sedangkan Gerindro terdiri dari kaum golongan menengah dan keeil serta bekas anggota PKI. Anggota PNI lama menyebar ke semua partai dari Parindra sampai ke PSH dan Muhammadiyah. Di dalam berbagai sumber diperkirakan bahwa orang Indonesia yang ikut menentang pemerintah Kolonial menjadi 200.000 orang sedangkan yang pro-kolonial sangat sedikit jumlahnya.

Gabungan Politik Indonesia atau GAPI yang didirikan pada tahun 1939 memiliki tujuan untuk menuntut pemerintah Belanda agar Indonesia mempunyai parlemen sendiri, sehingga GAPI mempunyai semboyan *INDONESIA BERPARLEMEN*. Sedangkan untuk latar belakang lahirnya GAPI ini disebabkan oleh gagalnya petisi Sutarjo, petisi yang berisi agar diadakannya musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda. Permintaan GAPI yang tidak langsung direalisasikan membuat organisasi ini semakin mendesak. Kongres yang dilakukan GAPI semakin kuat kedudukannya karena dihadiri berbagai lapisan masyarakat. Sikap kolektif organisasi ini dan sambutan-sambutannya menunjukkan adesi dengan GAPI. Mulai dari

kelompok buruh, wanita, pemuda, persatuan islam, mahasiswa, dan wakil-wakil daerah bergabung dengan GAPI.

Pemerintah Kolonial Belanda seharusnya menyadari keinginan rakyat karena dalam mempertahankan wilayah jajahannya dari serangan negeri lain terutama pada saat itu terjadi invasi Jepang ke Indonesia. Upaya ini tidak dilakukan, padahal sebenarnya sangat perlu untuk dilakukan dengan segera demi mobilitas pertahanan dalam masa genting ini demi kerja sama yang erat antara pemerintah dan rakyat yang akan dicapai melalui parlemen. Ketika pemerintah Hindia-Belanda tidak sanggup lagi menghadapi Jepang maka pada akhirnya pemerintah Hindia-Belanda pun akhirnya menyerahkan diri. Penyerahan diri ini dilakukan di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Penyerahan diri Kolonial Belanda kepada Jepang di Indonesia ini dikenal sebagai **PERJANJIAN KALIJATI**.

### **Peran Pers, Golongan Terpelajar Dan Profesional Dalam Pergerakan Nasional Indonesia**

Dalam sejarahnya perkembangan pers di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan pergerakan nasional di Indonesia. Satu kesatuan ini tidak dapat dipisahkan karena pers merupakan salah satu media utama yang digunakan oleh para tokoh pergerakan untuk menyampaikan perlawanan melalui opini-opini yang dimuat berdasarkan fakta yang ada, per juga digunakan sebagai media untuk menyampaikan kritik terhadap Kolonial Belanda dan peran pers yang paling utama adalah mampu memobilisasi massa. Raden Mas Djokomono alias Raden Mas Tirta Adhi Soerjo merupakan seseorang dari elite terdidik yang sadar akan pentingnya pers yang harus dimiliki golongan pribumi. Pada tahun 1906, beliau mendirikan Serekat Priyayi dan menerbitkan surat kabar Medan Prijaji di Bandung pada tahun 1907. Selain itu, ia juga menerbitkan Poetri Hindia sebagai majalah perempuan pertama di Indonesia tahun 1908. Tulisan-tulisan yang diterbitkan Tirta di surat kabar banyak mengkritik dan membeberkan kesewenang-wenangan pejabat pemerintah, sehingga ia pun dihukum dan diasingkan berkali-kali.

Semakin bertambahnya golongan elite modern terdidik, maka semakin banyak pula tumbuh kesadaran pada mereka akan perlunya kemajuan dan kesejahteraan bagi penduduk bumiputera. Kesadaran itu kemudian diwujudkan dengan membentuk organisasi pergerakan, dengan pers sebagai sarana untuk mengkomunikasikan gagasan, cita-cita dan program yang lain. Sehingga setiap organisasi pergerakan memiliki surat kabarnya masing-masing. Pada umumnya setiap organisasi pergerakan memiliki cita-cita dan tujuan yang sama sebagaimana tercermin dalam isi persnya yaitu tentang perlunya kemajuan, kesejahteraan, dan akhirnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Namun dalam hal bagaimana bentuk dan cara-cara perjuangan yang akan digunakan untuk mewujudkan cita-cita itu di tiap organisasi memiliki pandangan yang berbeda.

### **KESIMPULAN**

Dari hasil pemaparan materi yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa masa Pergerakan Nasional dimulai ketika berdirinya organisasi nasional pertama yaitu organisasi Budi Utomo. Pergerakan Nasional merupakan suatu babak baru dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, karena perlawanan kebangsaan Indonesia pada awalnya bersifat non-kooperatif dan bersifat kedaerahan. Corak perjuangan bangsa Indonesia terbagi kedalam tiga periode atau tiga masa yaitu dimulai pada masa pembentukan 1908-1920, kedua masa radikal 1920-1930, dan terakhir yaitu masa moderat 1930-1942. Selain pergerakan yang bersifat nasional, terdapat juga pergerakan yang bersifat regional atau kedaerahan seperti organisasi wanita dan organisasi kepemudaan yang menjadi cikal bakal lahirnya sumpah pemuda.

Dalam perjalanan organisasi-organisasi pada masa Pergerakan Nasional terdapat masa Krisis yang menjadikan Pergerakan Organisasi menjadi terhambat. Adapun krisis Pergerakan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti: (1) Krisis Malaise pada tahun 1929/1930 yang terjadi dan melanda dunia, (2) Diterapkannya pembatasan hak untuk berkumpul dan berserikat, (3) Gubernur Jenderal dapat menyatakan suatu organisasi pergerakan atau kegiatan yang

dilakukan dan bertentangan dengan law and order, dan (4) Banyak tokoh Pergerakan Kebangsaan Indonesia yang diasingkan. Perkembangan organisasi pergerakan pada masa akhir pemerintahan Hindia-Belanda di dominasi oleh partai seperti partai Parindro, Gerindo, dan GAPI. Permintaan partai GAPI untuk berparlemen tidak diindahkan/disetujui oleh pemerintah Hindia-Belanda bahkan hingga masa keruntuhan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia akibat Invasi Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 dengan cara Kolonial Belanda menyerahkan diri kepada Jepang di Kalijati sehingga disebut dengan perjanjian Kalijati.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- C. S. T Kancil dan Juliando, Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia, Jakarta: Erlangga, 1977. Hlm 16-17.
- Hasnudin dan Basri Amin, Dinamika Sejarah Masa Kolonial Belanda, Gorontalo, Pusat Dokumentasi Rakyat Gorontalo-AP3G dan Balai Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado.
- Hasbudin dan Basri Amin, Dinamika Sejarah Masa Kolonial Belanda, Gorontalo, Pusat Dokumentasi Rakyat Gorontalo-AP3G dan Balai Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado.
- A. K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Jakarta: Dian Rakyat, 1977. Hlm 46
- Anonimous., Sejarah Peristiwa Bojongsokoson: 9 Desember 1945, Dewan Harian Cabang Angkatan-45 Kotamadya DT II Sukabumi, tt.
- Munandi Saleh, Riwayat Perjuangan Mr. R. Syamsuddin: Wali Kota Pertama Bangsa Indonesia, Sukabumi: PD-PUI Kota Sukabumi, Hlm 15
- Jurnal Sejarah, Bela Wahyuni dan Irhas Fansuri Mursal, Analisis Masa Pergerakan Nasional Indonesia 1908-1942, Mahasiswa Prodi Ilmu Sejarah Universitas Jambi, Hlm 56
- Husda dan Husnaidi, Rekonstruksi Sejarah Kebangkitan Nasional, Jurnal Adabiya. Vol 21. No 2 (2019), Hlm 32
- Jurnal Sejarah, Analisis Masa Pergerakan Nasional Indonesia 1908-1942, Bela Wahyuni dan Irhas Fansuri Mursal. Vol. 2, No. 1, Juni 2022, Hlm 57
- Sartono Kartodirjo, dkk, Sejarah Nasional Indonesia V. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1977), Hlm 56
- G. Moedjanto, Indonesia Abad Ke-20. (Yogyakarta: Kanisius, 1988), Hlm 112
- Cahyo Budi Utomo, Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia: Dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), Hlm 99
- Akob, Bachtiar dan Teuku Junaidi, Malaise dan Pengaruhnya Terhadap Gerakan Nasional Indonesia, Jurnal Seuneubook Lada, No. 1, Vol. 2-Desember 2014, Hlm 5
- Ibid, Hlm 7
- Tan Malaka, Dari Penjara Ke Penjara, (Yogyakarta: Narasi, 2008), Hlm 39
- Suhartono, Loc.Cit. Hlm 118
- Yasmis, Jepang Dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, Jurnal Sejarah Lontar. Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2007, Hlm 11
- Suwirta, Andi. "Zaman Pergerakan, Pers, dan Nasionalisme Di Indonesia". Universitas Pendidikan Indonesia, Hlm 6.